

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemiskinan merupakan sekelompok orang yang tidak mampu untuk mencukupi kebutuhan ekonomi minimal dari standar hidup tersebut. Kemiskinan dalam arti *proper* merupakan sebuah keadaan dengan kekurangan uang dan barang untuk memenuhi kelangsungan hidup. Dalam arti luas, kemiskinan adalah sebuah fenomena *multiface* atau *multidimensional*. Terdapat lima dimensi pada suatu *integrated concept* yaitu kemiskinan (*proper*), ketidakberdayaan (*powerless*), kerentanan, ketergantungan (*dependence*), dan keterasingan (*isolation*) dari sisi geografis maupun sosiologis (Suryawati, 2005).

Menurut Badan Pusat Statistik, kemiskinan merupakan kondisi ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan dasar baik pangan maupun non-pangan agar menjadi hidup yang layak. Secara Standar Internasional/World Bank kemiskinan merupakan kondisi seseorang yang mengalami kehilangan kesejahteraan dengan total konsumsi \$1.9/hari. Badan Pusat Statistik menjelaskan, di Indonesia kemiskinan memiliki arti yang berbeda dengan ketentuan dunia dikarenakan seseorang dikatakan penduduk miskin jika rata-rata pengeluaran perkapita per bulan berada di bawah garis kemiskinan.

Dalam upaya menurunkan tingkat kemiskinan menjadikan sasaran bagi pembangunan nasional. Tujuan dari pembangunan nasional yaitu meningkatkan

kinerja dari perekonomian agar mampu menciptakan lapangan kerja dan memperbaiki kehidupan yang layak bagi masyarakat untuk mewujudkan kesejahteraan penduduk Indonesia. Adanya upaya untuk mengurangi tingkat kemiskinan perlu dilakukan secara komprehensif yang tercakup dalam aspek kehidupan masyarakat dan dilakukan secara terpadu. Dengan beberapa upaya seperti menyempurnakan implementasi dengan memperluas akses kredit bagi masyarakat miskin, meningkatkan pendidikan masyarakat, dan memperluas lapangan pekerjaan (Arifin & Wijaya, 2016).

Pemerintah mempunyai pendekatan dalam strategi menanggulangi kemiskinan dengan menggunakan tiga pendekatan. Pendekatan *pertama*, dengan mengurangi angka kemiskinan yang berfokus pada pemenuhan indikator kemiskinan. Pendekatan *kedua*, dengan meningkatkan daya beli masyarakat yang berfokus pada kapasitas skala hasil produksi sehingga dapat meningkatkan perekonomian pada daya beli. Pendekatan *ketiga*, dengan pendekatan peningkatan pengembangan struktur ekonomi yang berpihak pada skala hasil produksi.

Salah satu Hadits dari Buku Yusuf Ala Qaradawy Musykilatul Fakr wa Kayfa 'Alajaha Al-Islam tentang Problem-problem Kemiskinan dan Bagaimana Islam Menyelesaikannya, mengatakan bahwa: "*Wahai Allah hidupakanlah aku dalam keadaan miskin, dan matikanlah aku dalam keadaan miskin, serta kumpulkanlah aku bersama orang-orang yang miskin pada hari kiamat nanti*". Nabi Muhammad pernah berdoa agar Allah selalu melindunginya dari kefakiran sehingga beliau mengatakan hadits tersebut. Siti Aisyah bertanya kepada Nabi

“Mengapa berdoa demikian?” dan Nabi menjawab bahwa *“Orang miskin akan masuk surga lebih dulu daripada orang kaya, dengan jarak waktu 40 masa. Janganlah kamu menolak orang miskin meskipun dengan memberi separuh buah kurma. Cintailah dan dekatilah mereka, maka Allah akan mendekatkan kamu pada hari kiamat.”*

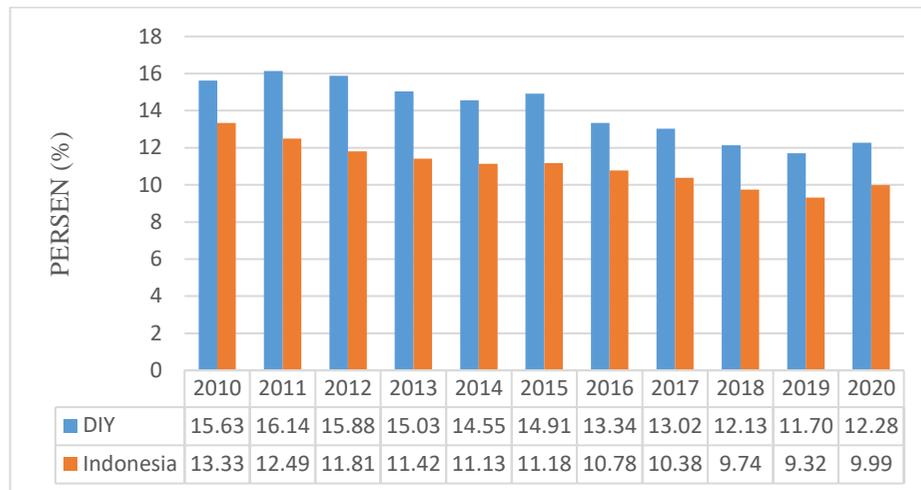
Dalam Al-Qur’an terdapat 33 ayat yang menjelaskan kata miskin. Salah satunya adalah Surat Al-Baqarah [2]: 268

الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُم بِالْفَحْشَاءِ وَاللَّهُ يَعِدُكُم مَّغْفِرَةً مِّنْهُ وَقَصْلًا لِّهُ وَاللَّهُ وَسِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Syaitan menjanjikan (menakut-nakuti) kamu dengan kemiskinan dan menyuruh kamu untuk berbuat kejahatan (kikir), sedangkan Allah menjadikan untukmu ampunan daripada-Nya serta karunia. Dan Allah Maha Luas lagi Maha Mengetahui.”

Jin atau manusia akan menakuti kemiskinan dengan cara membisikan, misalnya kurangnya bersedekah, akan terpuruk di dalam kemiskinan. Sehingga setan atau jin akan selalu menghalangi manusia dalam berbuat kebaikan. Allah akan mengampuni dosa-dosa dan memberikan karunia kepada kita. Jika kita bersedekah maka Allah akan menambah rezekinya dan karunia dari Allah akan bertambah.

Dalam mengukur keberhasilan suatu negara maka elemen kemiskinan harus dihilangkan. Jika suatu negara mempunyai tingkat kemiskinan yang tinggi maka akan melambatnya pertumbuhan ekonomi. Untuk mencapai kesejahteraan negara perlu adanya penekanan pada tingkat kemiskinan di setiap negara (Shafira, 2017).



Sumber: Badan Pusat Statistik

Gambar 1. 1
Perbandingan Tingkat Kemiskinan di DIY dan Indonesia
Tahun 2010-2020

Presentase tingkat kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2010 sebesar 15,63%, kemudian tahun 2011 meningkat menjadi 16,14%. Di tahun 2012 sampai tahun 2014 mengalami penurunan secara terus-menerus. Tahun 2015 tingkat kemiskinan meningkat sebesar 14,91%. Tahun 2016 sampai 2019 terjadi penurunan kembali secara terus-menerus. Tetapi di tahun 2020 meningkat kembali sebesar 12,28% yang mana pada tahun tersebut merupakan tahun dimana Indonesia mengalami masalah perekonomian karena adanya kasus Covid-19. Pada saat tahun 2020 juga terjadi peningkatan harga barang-barang kebutuhan pokok, sehingga penduduk yang masih tergolong tidak miskin tetapi penghasilannya berada di sekitar garis kemiskinan bergeser menjadi miskin.

Adapun presentase tingkat kemiskinan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2010 sampai tahun 2020 menunjukkan suatu keberhasilan pemerintah dalam menjalankan program. Salah satu faktor penyebab tingkat kemiskinan menurun yaitu Produk Domestik Regional Bruto, Pendidikan, Upah Minimum, dan Jumlah Penduduk (Ayu, 2018). PDRB di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi, sehingga arah perekonomian semakin jelas, dapat mengukur keberhasilan pemerintah, serta menjadi dasar pengambilan keputusan (Shafira, 2017).

Menurut studi ekonomi, pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu komponen yang kuat dalam mengurangi tingkat kemiskinan. Dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah maka produksi barang dan jasa juga meningkat serta tingkat pendapatan juga bertambah, sehingga taraf kesejahteraan masyarakat meningkat. Tetapi, pada pertumbuhan ekonomi yang tidak inklusif menjadi tidak berpengaruh dalam menurunkan tingkat kemiskinan. Adanya polarisasi pertumbuhan ekonomi mengakibatkan ketimpangan spasial antar satu daerah dengan daerah lain ataupun antar satu individu dengan individu lain (Lee & Sissons, 2016).

Pengangguran merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan. Pemerintah Indonesia mempunyai tantangan besar dalam indikator pembangunan karena mampu mengangkat kemiskinan serta mengurangi pengangguran yang signifikan. Pengangguran terjadi dikarenakan angkatan kerja yang tidak terserap oleh lapangan kerja. Selain itu, jika tidak mempunyai

pekerjaan maka tidak dapat memenuhi standar kehidupan (Suripto & Subayil, 2020).

Menurut sudut pandang makro ekonomi, pengangguran yang tinggi menjadi sumber masalah. Dampak dari pengangguran yang tinggi adalah sumber daya yang melimpah tetapi terbuang percuma, kurangnya pendapatan masyarakat, dan berkurangnya tingkat kemakmuran yang sudah dicapai. Jika tingkat kemakmuran menurun maka akan menyebabkan kemiskinan (Arifin & Wijaya, 2016). Menurut teori Hukum Okun menyatakan bahwa jika laju pertumbuhan ekonomi tinggi, maka tingkat pengangguran dapat menurun. Begitu juga sebaliknya, jika laju pertumbuhan ekonomi menurun maka akan meningkatkan tingkat pengangguran.

Pengangguran terjadi karena ketidakseimbangan pada pasar tenaga kerja. Sehingga pemerintah menetapkan upah minimum untuk meningkatkan upah pekerja. Dalam ketentuan upah minimum mengakibatkan tingkat upah melebihi tingkat upah pasar, sehingga jumlah tenaga kerja yang ditawarkan lebih banyak dari jumlah tenaga kerja yang diminta. Oleh karena itu, kenaikan upah mengakibatkan adanya pengangguran (Biçerli & Kocaman, 2019)..

Selain itu, kenaikan upah memicu kenaikan pendapatan pekerja. Pada umumnya pekerja merupakan kelompok yang memiliki pendapatan rendah dengan konsumsi marginal (*Marginal Propensity to Consume-MPC*) yang besar daripada kelompok pekerja yang memiliki pendapatan tinggi. Kebijakan pemerintah dalam meningkatkan upah minimum agar memicu minat masyarakat

dalam bekerja serta faktor penting yaitu karena kebutuhan masyarakat semakin meningkat. Jika kebutuhan masyarakat terpenuhi maka dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan terhindar dari masalah kemiskinan (Sutikno et al., 2019).

Dalam pengentasan kemiskinan pemerintah juga melihat pada bidang pendidikan. Pendidikan merupakan *human capital investment* yang mempunyai pengaruh untuk keluar dari adanya kemiskinan. Dalam mereduksi kemiskinan tidak hanya pendidikan tetapi diseimbangkan dengan pembukaan lapangan pekerjaan. Dengan adanya mereduksi tersebut, bisa terjadinya meningkatnya tingkat kemiskinan.

Pendidikan memiliki manfaat agar pengetahuan semakin bertambah dan mampu mempelajari keterampilan di dunia kerja. Peran penting dari pendidikan salah satunya dapat mengurangi dampak kemiskinan baik itu di negara Indonesia, negara lainnya maupun dalam jangka panjang. Selain dari kesehatan dan ekonomi, pendidikan juga menjadi salah satu bidang utama dalam pembangunan. Oleh karena itu, pendidikan dapat dikatakan sebagai modal manusia (*human capital*) karena kontribusinya yang sangat besar (Susanto & Pangesti, 2019).

Permasalahan kemiskinan bukan hanya pada faktor ekonomi saja, melainkan adanya faktor lain seperti pendidikan, kesehatan, dan kriminalitas. Sehingga perlunya dilakukan kebijakan publik agar tidak merambat pada masalah yang lain. Menurut Databoks pada tahun 2020 tingkat kemiskinan di Daerah

Istimewa Yogyakarta tergolong paling tinggi di Pulau Jawa sebesar 12,28% dengan peringkat 11 dari 34 provinsi di Indonesia.

Kenaikan pertumbuhan ekonomi dapat menurunkan tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran. Tingginya tingkat kemiskinan mengakibatkan pertumbuhan ekonomi di Daerah Istimewa Yogyakarta masih belum maksimal. Peningkatan tenaga kerja juga memperlihatkan adanya kesempatan kerja yang berpengaruh pada peningkatan output pada pertumbuhan ekonomi.

Salah satu faktor dalam menentukan kemakmuran masyarakat adalah tingkat pendapatan. Adanya kenaikan upah akan berdampak pada tenaga kerja yang menurun, sehingga tingkat pengangguran akan bertambah. Begitu juga sebaliknya, jika tingkat upah menurun maka kesempatan kerja akan meningkat, sehingga adanya timbal balik dengan tingkat upah.

Pertumbuhan ekonomi yang meningkat perlu adanya investasi di bidang lain untuk mengembangkan kemampuan sumber daya manusia (*human capital*) salah satunya pendidikan. Dengan adanya, pendidikan dan lingkungan dengan masyarakat berpenghasilan rendah menjadi salah satu penyebab kemiskinan. Oleh karena itu, meningkatnya tingkat pendidikan disertai pengetahuan dan keahlian, akan mendorong tingkat produktivitas kerja.

Dalam upaya mengentaskan kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta perlunya adanya kebijakan di masa yang akan datang dari setiap faktor-faktor

yang mempengaruhinya sehingga dapat diprediksi dan pemerintah segera mengambil tindakannya.

Berdasarkan dari uraian di atas dan data-data yang tercantum, maka penelitian ini berjudul, “*Analisis Determinan Tingkat Kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2010-2020*”.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang dapat diambil dari latar belakang di atas adalah:

1. Bagaimana pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Tingkat Kemiskinan di Kabupaten/Kota Daerah Istimewa Yogyakarta?
2. Bagaimana pengaruh Tingkat Pengangguran terhadap Tingkat Kemiskinan di Kabupaten/Kota Daerah Istimewa Yogyakarta?
3. Bagaimana pengaruh Upah Minimum terhadap Tingkat Kemiskinan di Kabupaten/Kota Daerah Istimewa Yogyakarta?
4. Bagaimana pengaruh Pendidikan terhadap Tingkat Kemiskinan di Kabupaten/Kota Daerah Istimewa Yogyakarta?

C. Tujuan Penelitian

Dari perumusan masalah yang sudah dijabarkan, maka capaian peneliti, yaitu:

1. Untuk mengetahui pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Tingkat Kemiskinan di Kabupaten/Kota Daerah Istimewa Yogyakarta.

2. Untuk mengetahui pengaruh Tingkat Pengangguran terhadap Tingkat Kemiskinan di Kabupaten/Kota Daerah Istimewa Yogyakarta.
3. Untuk mengetahui pengaruh Upah Minimum terhadap Tingkat Kemiskinan di Kabupaten/Kota Daerah Istimewa Yogyakarta.
4. Untuk mengetahui pengaruh Pendidikan terhadap Tingkat Kemiskinan di Kabupaten/Kota Daerah Istimewa Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi peneliti, memberikan manfaat untuk menambah wawasan yang luas tentang Tingkat Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran, Upah Minimum, Pendidikan, dan Indeks Pembangunan Manusia.
2. Bagi pemerintah dan dinas-dinas terkait, dapat menjadi acuan dalam mengambil kebijakan masalah kemiskinan sehingga dapat diketahui faktor-faktor yang mempengaruhinya.
3. Bagi masyarakat dan pembaca, dapat dijadikan sebagai acuan sumber pengetahuan tentang masalah kemiskinan di Kabupaten/Kota Daerah Istimewa Yogyakarta.